



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI II JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4 JAKARTA 10710  
TELEPON (021) 3449230 PSW. 5200. (021) 3812684 FAKSIMILE (021) 3813039 SITUS [www.djpb.kemenkeu.go.id](http://www.djpb.kemenkeu.go.id)

Nomor : S- 254 /PB/2020 18 Maret 2020  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Pengaturan Penyampaian Usul Revisi Anggaran Pada  
Direktorat Jenderal Perbendaharaan TA 2020

Yth. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/  
Wakil Kepala/Jaksa Agung Muda Pembinaan/Deputi/Direktur Keuangan  
Kementerian/Lembaga (Daftar Terlampir)

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-6/MK.02/2020 tentang *Refocussing* Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan dalam rangkaantisipasi atas penyebaran COVID-19, maka perlu dilakukan pengaturan kembali mengenai penyampaian usulan revisi anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-2/PB/2020 tentang Petunjuk Teknis Revisi Anggaran yang Menjadi Kewenangan DJPb pada TA 2020.

Penyampaian usulan revisi anggaran yang merupakan kewenangan DJPb diatur sebagai berikut:

1. Usulan revisi anggaran dilakukan tanpa menyampaikan dokumen asli (*hardcopy*).
2. Pengajuan usulan revisi dilakukan melalui Aplikasi SAKTI Web - Modul Penganggaran.
3. Dokumen pendukung dalam format pdf diunggah pada aplikasi SAKTI Web - Modul Penganggaran.
4. Pimpinan unit eselon I pemilik Program atau KPA Satker wajib menatausahakan dokumen asli (*hardcopy*) usulan revisi anggaran.
5. Ketentuan ini berlaku sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut.

Demikian disampaikan untuk dipedomani.

Direktur Jenderal,  
  
Andri Hadiyanto 

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Anggaran;
2. Direktur Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan BLU;
3. Direktur Sistem Perbendaharaan;
4. Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan; dan
5. Para Kepala Kanwil DJPb.

Lampiran Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan:  
Nomor : S- 254 /PB/2020  
Tanggal : 18 Maret 2020

**DARTAR**  
**SEKRETARIS JENDERAL/SEKRETARIS UTAMA/SEKRETARIS/WAKIL KEPALA/  
JAKSA AGUNG MUDA PEMBINAAN/DEPUTI/DIREKTUR KEUANGAN  
KEMENTERIAN /LEMBAGA**

1. Sekretaris Jenderal MPR RI
2. Sekretaris Jenderal DPR RI
3. Sekretaris Jenderal BPK RI
4. Sekretaris Mahkamah Agung RI
5. Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan RI
6. Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara RI
7. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI
8. Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri RI
9. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan RI
10. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
11. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan RI
12. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian RI
13. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian RI
14. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI
15. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan RI
16. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
17. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI
18. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI
19. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan RI
20. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI
21. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
22. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
23. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI
24. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI
25. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI
26. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI
27. Sekretaris Jenderal Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
28. Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara RI
29. Sekretaris Kementerian Riset dan Teknologi RI/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional
30. Sekretaris Kementerian Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah RI
31. Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI
32. Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI
33. Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara
34. Sekretaris Utama Badan Siber dan Sandi Negara
35. Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional
36. Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik
37. Sekretaris Utama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sappenas

38. Sekretaris Utama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN RI
39. Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional RI
40. Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika RI
41. Kepala Pusat Keuangan Kepolisian Negara RI
42. Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan
43. Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional
44. Sekretaris Utama Badan Koordinasi Penanaman Modal
45. Sekretaris Utama Badan Narkotika Nasional
46. Sekretaris Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI
47. Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
48. Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
49. Sekretaris Utama Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
50. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
51. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
52. Sekretaris Utama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
53. Sekretaris Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
54. Sekretaris Utama Badan Tenaga Nuklir Nasional
55. Sekretaris Utama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
56. Sekretaris Utama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
57. Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial
58. Sekretaris Utama Badan Standardisasi Nasional
59. Sekretaris Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir
60. Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara
61. Sekretaris Utama Arsip Nasional RI
62. Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara
63. Sekretaris Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
64. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan RI
65. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olah Raga RI
66. Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi
67. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah
68. Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI
69. Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana
70. Sekretaris Utama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
71. Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
72. Sekretaris Utama Badan SAR Nasional
73. Sekretaris Jenderal Komisi Pengawas Persaingan Usaha
74. Sekretaris Jenderal Badan Pengembangan Wilayah Suramadu
75. Sekretaris Jenderal Ombudsman RI
76. Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan
77. Sekretaris Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
78. Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
79. Kepala Deputy Administrasi Sekretariat Kabinet
80. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum
81. Direktur Administrasi dan Keuangan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
82. Direktur Keuangan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia

83. Kepala Biro Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
84. Sekretaris Utama Badan Keamanan Laut
85. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI
86. Sekretaris Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
87. Kepala Biro Perencanaan Setjen Kemenhan (U.O Kementerian Pertahanan)
88. Asisten Perencanaan Umum Panglima TNI (U.O Markas Besar TNI)
89. Asisten Perencanaan KASAD (U.O Markas Besar TNI AD)
90. Asisten Perencanaan KASAL (U.O Markas Besar TNI AL)
91. Asisten Perencanaan KASAU (U.O Markas Besar TNI AU)